

# **MENGUAK POSISI DAN TUJUAN OTENTIK EKONOMI**

*Telaah Etika Bersama Karl Polanyi dan Aristoteles*

**Andre Ata Ujan**

**ABSTRAKSI.** Ekonomi harus dimengerti sebagai kegiatan yang bersifat sosial, karena ekonomi merupakan bagian dari dan tertanam dalam peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Sifat sosial ekonomi mengisyaratkan bahwa tujuan otentik ekonomi adalah untuk mewujudkan kesejahteraan itu bersama. Tujuan ini mengimplikasikan bahwa nilai-nilai moral merupakan bagian yang terpisahkan dari prinsip dasar dalam aktivitas ekonomis. Pada zaman sekarang para ahli ekonomi tak membuat definisi bahwa ekonomi hanya bersifat individual, karena tujuan ekonomi dilihat hanya untuk memperkaya diri dengan perolehan keuntungan sebesar-besarnya. Dengan demikian tujuan ekonomi hanyalah untuk mewujudkan kepentingan diri sendiri, bahkan mengungkapkan egoisme yang absolut. Dalam pandangan ini moralitas tidak lagi diletakkan sebagai dasar dalam kegiatan ekonomi. Praktik seperti ini sebagaimana ditegaskan oleh Aristoteles dan Karl Polanyi telah mematikan otentisitas ekonomi. Dengan praktik seperti ini ekonomi tidak lagi mensejahterakan masyarakat, melainkan menyengsarakannya.

**ABSTRACT.** *Economy is essentially a social activity. It is a part of and embedded in social rules of game. This character signifies that the main purpose of economical activities is to promote the common good for all people. This principle however is overlooked by many economist. In the perspective of new capitalism, economy is understood as the sole instrument to getting profit as much as possible. Egoism becomes the basic motive of economical activity. Instead of promoting common good, economy fences itself into profit maximalization principle. In the context of this ambition, moral principles are eliminated from economic activities. According to Karl Polanyi and Aristoteles, this motive drives economy to the wrong orientation.*

**KATA KUNCI:** Kesejahteraan sosial, otentisitas ekonomi, moral ekonomi.

## **1. PENDAHULUAN**

Proses pemilihan presiden dan wakil presiden dalam Pemilihan Umum tahun 2009 diwarnai perdebatan menarik perihal sistem ekonomi. Calon presiden dan wakil presiden dari Partai Demokrat mendapat

penolakan keras dari para pesaing politiknya dengan alasan kandidat kursi kepresiden itu merupakan pendukung ekonomi liberal. Dituduh sebagai sistem yang tidak berpihak pada kepentingan banyak orang, liberalisme ekonomi cenderung dibuang. Ekonomi kerakyatan kemudian diusung sebagai pengganti liberalisme ekonomi atau lebih populer dilabel sebagai ekonomi neoliberal.

Tegangan itu memperlihatkan dengan jelas bahwa, *pertama*, sistem ekonomi apa pun selalu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nasib dan kesejahteraan rakyat banyak dan karenanya sistem ekonomi yang baik harus berpihak pada kepentingan banyak orang. *Kedua*, tegangan itu juga menegaskan bahwa ekonomi tidak punya tujuan dalam dirinya sendiri. Ekonomi adalah alat yang harus tunduk pada kepentingan manusia. Dengan kata lain, ekonomi tidak bebas nilai. Sebagai ilmu sosial, ekonomi tidak hanya berurusan dengan masalah-masalah teknis keahlian, tetapi lebih dari itu, ekonomi berurusan langsung dengan kesejahteraan manusia. Alasan itu juga yang membuat John Meynard Keynes, dengan gagasannya yang umum dikenal sebagai “*Keynesian policy*”, lebih suka menyebut ekonomi sebagai ilmu moral dan bukan ilmu alam. Dalam suratnya kepada rekan korespondensinya Roy Horrod, sebagaimana telah dikutip di atas, ia menulis: “*economics is essentially a moral science and not a natural science. That is to say, it employs introspection and judgements of value*”<sup>1</sup>. Karena muatan moralnya yang menempatkan kesejahteraan manusia sebagai tujuan sentralnya, maka ukuran-ukuran kuantitatif yang umum dijadikan standard perkembangan ekonomi tak selalu dapat menjadi indikasi valid untuk menjelaskan signifikansi ekonomi dari segi kesejahteraan manusia.

Catatan terakhir di atas penting karena tak jarang kapitalisme, doktrin penggerak utama akumulasi modal tanpa henti, diyakini berwajah

paradoks. Diakui bahwa hidup manusia kini secara umum memang jauh lebih mudah dan nyaman berkat kemajuan ekonomi. Tetapi pada saat yang sama ekonomi kapitalis juga ditengarai menjadi penyebab dari berbagai ketimpangan sosial. Kemiskinan yang menjadi pengalaman keseharian masyarakat dunia ketiga, kekerasan, kriminalitas, keterbelakangan dalam arti luas, serta berbagai patologi sosial lainnya tak jarang berhulu pada nafsu mengejar keuntungan tanpa henti. Joseph E. Stiglitz, salah satu peraih Nobel Ekonomi, bahkan percaya bahwa dalam etos *self-regulating market* tak musthail kapitalisme berevolusi menjadi *mafia capitalism*.<sup>2</sup> Apa yang salah dengan ekonomi? Pertanyaan ini membawa kita kepada sekurang-kurangnya dua kemungkinan perspektif jawaban. *Pertama*, perspektif formal ekonomi yang kini menjadi *mainstream* ekonomi modern. *Kedua*, sebuah perspektif lebih mendalam yang mempersoalkan esensi ekonomi itu sendiri.

Dengan bantuan Aristoteles dan Karl Polanyi, paper ini memusatkan perhatian pada perspektif kedua, yakni menggali esensi ekonomi untuk memahami tujuan otentik ekonomi. Karl Polanyi yang disebut-sebut sebagai ahli sejarah pemikiran ekonomi dapat membantu penelusuran kita ke arah itu. Karyanya *The Great Transformation, The Political and Economic Origins of Our Time*, diterbitkan pertama kali pada tahun 1944, menjadi penting justru karena keberhasilannya menyibak posisi otentik ekonomi. Hasil penelusuran Polanyi bahkan menjadi afirmasi historis-antropologis atas gagasan filosofis, atau lebih tepatnya gagasan moral ekonomi, yang dikembangkan oleh Aristoteles (384-322 B.C.) pada abad ke-4 sebelum masehi yang melalui buku *Politics* dan *Nicomachean Ethics*, Aristoteles menegaskan peran dan kedudukan original ekonomi dalam

masyarakat dan sekaligus kemungkinan perkembangan ke arah simplifikasi pemahaman ekonomi akibat kecenderungan mengejar keuntungan.

Dalam upaya mengeksplorasi kekayaan gagasan Polanyi dan Aristoteles terutama dari perspektif kesejahteraan manusia, paper ini secara berturut akan mendiskusikan: (1) kedudukan ekonomi dalam masyarakat; (2) kebangkitan ekonomi Aristoteles; dan (3) kesesatan konseptual sebagai alasan mendasar terjadinya penyimpangan terhadap makna dan tujuan otentik ekonomi .

## **2. KEDUDUKAN EKONOMI DALAM MASYARAKAT**

### **2.1 PRODUKSI DAN DISTRIBUSI SEBAGAI UNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL**

Melalui penelusuran historis-antropologis, Polanyi mendapatkan bahwa ekonomi sebagai sebuah sistem sesungguhnya “tercemplung” (*submerged*) dalam jaringan relasi sosial. Relasi ekonomi dipahami sebagai bagian dari dan tertanam (*embedded*) dalam peraturan sosial yang berlaku dalam masyarakat.<sup>3</sup> Dengan demikian ekonomi ditempatkan dalam bingkai kepentingan kolektif komunitas (baca: masyarakat). Dalam kultur ekonomi seperti itu, tujuan individual, demikian Polanyi, jarang muncul ke permukaan. Terlihat di sini adanya semacam kesadaran moral natural kolektif untuk mengemban tanggung jawab sosial di mana kepentingan bersama mendapat prioritas dan dengan itu ikatan-ikatan sosial pun terpelihara.

Menjadi jelas bahwa penempatan ekonomi dalam bingkai relasi sosial tidak dimaksudkan untuk mengamankan kepentingan material individual anggota masyarakat, melainkan terutama untuk menegaskan posisi sosial ekonomi dalam kaitannya dengan pemeliharaan dan pelestarian

nilai-nilai yang menjadi kekayaan sosial masyarakat. Barang-barang material hanya dipandang bernilai sejauh melayani tujuan sosial tersebut. Itu sebabnya Polanyi menegaskan bahwa baik proses produksi maupun distribusi tidak memiliki kaitan langsung dengan kepentingan khas ekonomi, yakni pemilikan barang. Setiap tindakan ekonomi, menurut Polanyi, selalu ditempatkan dalam sejumlah kepentingan sosial dan tujuan inilah yang menggerakkan proses produksi dan distribusi. Jelas bahwa proses-proses ekonomi secara otentik digerakkan bukan terutama oleh motif-motif ekonomi, melainkan oleh motif non-ekonomi. Pertanyaannya, mengapa individu bersedia memelihara dan tunduk pada norma-norma sosial dan dengan itu “mengorbankan” kepentingan ekonomi pribadi?

Polanyi mencatat dua alasan untuk itu. *Pertama*, individu mau tidak mau harus menerima tata cara yang berlaku dalam masyarakat karena itulah basis baginya untuk membangun dan menjaga harga diri (*code of honor*). Bahkan penerimaannya terhadap tata cara sosial dilihatnya sebagai bentuk ungkapan kebaikan hati (*generosity*). Tanpa itu ia akan terbuang dari masyarakat atau komunitas. *Kedua*, dalam jangka panjang kewajiban bersifat timbal balik dan kepentingan individu justru terpenuhi dengan paling baik melalui kesediaan memberi dan menerima dalam diri individu itu sendiri.<sup>4</sup> Alasan-alasan ini, sekali lagi, memperlihatkan kuatnya motif non ekonomis dalam proses produksi dan distribusi. Dengan kata lain, alasan ekonomi bukan motif utama kegiatan ekonomi. Polanyi mengatakan bahwa keinginan mendalam manusia, entah baik atau buruk, seluruhnya diarahkan kepada tujuan-tujuan non-ekonomi, juga proses produksi dan distribusi itu sendiri.

Pertanyaannya, kalau alasan-alasan non-ekonomi dominan sebagai motif ekonomi, lalu bagaimana keteraturan produksi dan distribusi ekonomi

terjamin keberlangsungannya? Berkaitan dengan pertanyaan ini Polanyi menemukan adanya tiga prinsip sebagai nilai-nilai sosial yang sekaligus menjadi etos sosial yang memungkinkan terjadinya kontinuitas proses produksi dan distribusi, yakni: (1) resiprositas; (2) redistribusi; dan (3) kekeluargaan.<sup>5</sup>

*Pertama*, prinsip resiprositas berfungsi terutama dalam konteks organisasi masyarakat berbasis keluarga dan kekerabatan. Seorang laki-laki, misalnya, akan berusaha memberikan yang terbaik bagi saudara perempuan atau keluarganya karena dengan begitu ia mendapatkan penghargaan. Kegagalan melakukan yang terbaik bagi keluarganya akan merusak reputasinya. Terlihat di sini asas *fairness* bekerja sebagai prinsip pendorong resiprositas. Untuk mendapatkan sesuatu (*benefit*) dari pihak lain (baca: masyarakat) individu harus terlebih dahulu bersedia melakukan apa yang menjadi kewajibannya (*burden*), yakni bekerja demi kepentingan segenap anggota komunitas (masyarakat). Di sini juga terlihat bahwa unsur kepentingan diri (*self-interest*) ikut menentukan seberapa besar dedikasi individu bagi segenap anggota keluarga. Akan tetapi *self-interest* di sini pasti berbeda dengan gagasan yang sama dalam Adam Smith. *Self-interest* dalam pandangan Polanyi terutama bersifat non-ekonomis (kehormatan, harga diri, penerimaan dan pengakuan sosial); sementara *self-interest* dalam pemikiran Smith bersifat ekonomis (*economic gain*).<sup>6</sup>

Asas resiprositas, menurut Polanyi, didukung oleh pola hubungan kemasyarakatan yang bersifat simetris, yakni sebuah pola hubungan di mana sub-kelompok dalam suatu masyarakat desa membangun relasi dengan kelompok masyarakat lainnya dengan saling memberi dan menerima. Tentu saja semakin kuat ikatan kekerabatan suatu masyarakat atau komunitas, semakin efektif pula asas resiprositas bekerja. Sebaliknya semakin luas dan

longgar ikatan kekerabatan, semakin tidak mudah pula asas yang sama berfungsi efektif.

*Kedua*, selain prinsip resiprositas, masyarakat juga mempertahankan produksi melalui asas redistribusi. Di sini diandaikan adanya kekuasaan terpusat yang berfungsi mengoleksi kekayaan hasil produksi yang disumbangkan oleh anggota masyarakat untuk kemudian mendistribusikannya kembali kepada anggota masyarakat yang membutuhkannya. Dengan otoritas yang dimilikinya, negara berfungsi menciptakan kesejahteraan bersama melalui kebijakan-kebijakan publik yang mengatur pendistribusian kekayaan negara secara adil. Dalam masyarakat seperti ini, menurut Polanyi, gagasan keuntungan justru tidak mendapat tempat. Dalam masyarakat tradisional, seorang kepala suku atau raja memainkan peran sebagai perantara dengan mengumpulkan hasil produksi dari masyarakat lalu membagikannya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. Perdagangan untuk mencari keuntungan tidak punya tempat. Sebaliknya memberi dengan suka rela justru dipandang sebagai keutamaan. Ekonomi dengan demikian hanya berfungsi sebagai organisasi sosial, bukan kegiatan bermotif keuntungan.

Dalam konteks masyarakat modern, pajak (progresif) dapat menjadi contoh untuk prinsip redistribusi. Melalui kebijakan pajak negara mengoleksi kekayaan hasil produksi anggota masyarakat untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat melalui pengadaan sarana publik atau sosial. Di sini negara merasa bertanggung jawab menciptakan kondisi dan bahkan terlibat langsung menjamin kesejahteraan warga negara. Gagasan negara kesejahteraan (*welfare state*) yang sekarang ini dipraktikkan di negara-negara Barat seperti Jerman tentu saja beroperasi dengan prinsip yang sama.

Prinsip terakhir, *ketiga*, yang memainkan peranan penting dalam menjaga keberlangsungan produksi dan distribusi adalah prinsip kekeluargaan (*householding*). Prinsip ini memuat kewajiban untuk memproduksi terutama untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Masyarakat Yunani menyebutnya dengan nama *oiconomia*, yang merupakan asal dari kata ekonomi. Prinsip ini menunjuk kepada kewajiban moral setiap anggota rumah tangga untuk saling membantu atau berkontribusi demi kesejahteraan segenap anggota rumah tangga sebagai model kehidupan ekonomi. Produksi dan upaya mengumpulkan atau menyimpan barang harus tetap ditempatkan dalam kepentingan pemenuhan kebutuhan segenap anggota. Asas kekeluargaan, demikian Polanyi, dapat berfungsi efektif dalam masyarakat yang dibangun dalam pola autarki (*autarchy*). Dalam arti asli ini, keuntungan tidak menjadi tujuan utama ekonomi. Dengan demikian, sebagaimana ditegaskan Aristoteles, produksi pada tingkat keluarga pada esensinya dibangun semata-mata untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau untuk digunakan (*use*) dan karenanya harus dibedakan dengan tegas dari kepentingan mengejar keuntungan (*money making*). Bahkan bagi Aristoteles, pasar yang berorientasi pada keuntungan hanya dapat diterima sejauh itu memang perlu untuk keberlangsungan kepentingan rumah tangga. Dengan kata lain, transaksi pasar tidak boleh menghancurkan ekonomi rumah tangga.<sup>7</sup> Dengan pembedaan itu Aristoteles, menurut Polanyi, menegaskan pentingnya melepaskan motif ekonomi dari semua relasi sosial yang pada dasarnya berfungsi membatasi motif ekonomi.

Perlu dicatat bahwa dengan mengedepankan asas resiprositas, redistribusi, dan kekeluargaan, Polanyi pun sama sekali tidak bermaksud menutup mata terhadap praktik ekonomi yang berorientasi pada keuntungan. Ia, misalnya, secara eksplisit mengakui bahwa pada abad ke-16

dan seterusnya pasar memang penting dan karena itu tersebar luas. Bahkan di bawah merkantilisme pasar menjadi perhatian utama pemerintah. Namun melalui observasi historis dan antropologis atas fenomena ekonomi ia sampai pada kesimpulan bahwa motif ekonomi (baca: mengejar keuntungan) bukanlah motif dominan dalam ekonomi. Tidak ada tanda apa pun, demikian Polanyi, yang memperlihatkan bahwa pasar mengendalikan manusia. Manusia, demikian Polanyi lebih ditentukan oleh motif-motif non-ekonomi, seperti kebiasaan-kebiasaan dan hukum, kepercayaan-kepercayaan yang bersifat magis dan religius, serta berbagai sistem nilai. Hal-hal seperti ini sangat mempengaruhi dan dengan demikian membentuk cara hidup dan perilaku manusia. Karena itu, menurutnya, adalah berlebihan apabila motif keuntungan dijadikan penggerak utama ekonomi.

## 2.2 KEBANGKITAN EKONOMI ARISTOTELES

Dengan temuan historis-antropologis seperti di atas, ekonomi secara otentik berwatak komunitarian. Ekonomi dibangun tidak demi kepentingan individual, tetapi demi kesejahteraan bersama. Bahkan ekonomi tidak dibangun demi ekonomi itu sendiri melainkan demi memperkuat ikatan serta nilai-nilai sosial. Dengan gagasan seperti itu, Polanyi menghidupkan kembali, sekaligus membuktikan bahwa pemikiran klasik Aristoteles tentang ekonomi masih hidup dan bertahan. Pada intinya filsuf klasik terkemuka ini menekankan pentingnya membedakan ekonomi rumah tangga (*household management*) dan perdagangan (*commerce*). Yang pertama bertujuan menyediakan berbagai barang demi pemenuhan kebutuhan sebagai manusia; sedangkan yang kedua mengandalkan perdagangan dengan uang sebagai alat tukar dengan orientasi pada pengumpulan kekayaan (*wealth acquisition*). Ekonomi rumah tangga berwatak

kolektif; sedangkan ekonomi berbasis perdagangan berwatak individualis. Ekonomi rumah tangga berbicara tentang pemanfaatan sumber ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari; sedangkan ekonomi yang berorientasi pada perolehan kekayaan berbicara tentang produksi. Padahal, menurut Aristoteles, “kehidupan pada dasarnya adalah aksi dan bukan produksi”.<sup>8</sup> Maksudnya, makna kehidupan manusia jauh lebih luas dari sekadar urusan bagaimana memperoleh kekayaan. Nilai kehidupan sebagai manusia justru terletak pada bagaimana ia membangun relasi yang luas dan bermakna dengan alam dan sesama manusia. Dengan kata lain, menekankan ekonomi sebagai alat mengejar keuntungan (*usury*) justru mempermiskin makna ekonomi dan sekaligus melepaskan ekonomi dari posisi otentiknya sebagai alat pemenuhan kesejahteraan bersama.

Merujuk pada makna asli ekonomi (*oikos*, yang berarti rumah tangga), Polanyi menekankan kembali posisi Aristoteles bahwa ekonomi memiliki keprihatinan langsung pada relasi pribadi-pribadi yang tergabung sebagai anggota keluarga atau komunitas (*koinonia*). Keprihatinan kolektif itu tumbuh menjadi semangat keluarga, demikian Aristoteles, karena setiap anggota sesungguhnya dipersatukan secara kuat oleh kehendak baik (*philia*) masing-masing anggota keluarga. *Philia* mengungkapkan diri dalam bentuk resiprositas (*antipeponthos*). Itu sebabnya, istilah komunitas, pemenuhan diri, dan keadilan menjadi kata-kata kunci dalam gagasan ekonomi Aristoteles. Bahkan tindakan memberi kepada orang yang tepat bagi Aristoteles jauh lebih mulia daripada menerima dan mengambil dari orang yang tepat. Dengan itu, Aristoteles menegaskan bahwa relasi ekonomi sesungguhnya semata-mata alat dan karenanya manusia sebagai makhluk moral seharusnya bertindak berdasarkan motif lebih tinggi dari sekedar tuntutan asas resiprositas. Bagi Aristoteles ini juga menjadi alasan mengapa orang yang

baik hati sulit menjadi kaya. Ketika ia lebih memilih untuk memberi daripada menerima dan mengumpulkan kekayaan, serta mengagungkan kekayaan demi berbagi dengan yang lain dan bukan demi kekayaan itu sendiri, ia tidak akan pernah menjadi kaya secara material.<sup>9</sup> Adanya *philia* sebagai pemersatu dan basis keprihatinan kolektif anggota keluarga menguatkan posisi Polanyi bahwa keuntungan ekonomi (*economic gain*) atau kekayaan berupa uang bukanlah satu-satunya motif ekonomi manusia. *Philia* adalah insentif non-ekonomi yang justru mendorong anggota keluarga saling berbagi, berkontribusi bagi kesejahteraan bersama.<sup>10</sup>

Orientasi pada kesejahteraan bersama itu juga menjadi jelas melalui istilah *metadosis* yang digunakan Aristoteles untuk menjelaskan pemikirannya tentang ekonomi. Istilah tersebut dengan baik menegaskan kultur ekonomi macam apa yang berkembang dalam masyarakat tradisional (Yunani) berkaitan dengan kegiatan ekonomi. *Metadosis*, sebagaimana dijelaskan oleh Polanyi, oleh sebagian ahli diterjemahkan dengan “pertukaran” (*exchange*). Dan itu, tegas Polanyi, merupakan salah satu contoh salah tafsir atas gagasan ekonomi Aristoteles. Menurutnya, Aristoteles menggunakan istilah *metadosis* justru untuk menegaskan praktik resiprositas melalui kesediaan saling memberi dengan menjalankan apa yang menjadi bagian kewajibannya (*giving a share*) dalam budaya Yunani. Istilah itu menggambarkan karakter unilateral individu untuk memberi, berkontribusi, atau *sharing* dengan anggota komunitas.<sup>11</sup> Dengan kata lain, *metadosis* pada galibnya menjadi perwujudan, meminjam John Rawls, asas *fairness* dalam kehidupan ekonomi.<sup>12</sup>

Apakah Aristoteles tidak mengenal “pertukaran” (*allage*), sebuah istilah yang lekat dengan perdagangan demi keuntungan? Karena menekankan fungsi komunalnya, maka bagi Aristoteles pertukaran ekonomi

tak lebih dari pertukaran “pelayanan”, di mana barang yang dipertukarkan selalu dilihat dari segi *sbaring* timbal balik berbasis harga yang adil. Ekonomi atau *oikos* (Yunani) secara literer menunjuk langsung pada relasi antar pribadi yang membentuk lembaga natural yang disebut keluarga. Karena itu, pertukaran dilakukan atas dasar kesetaraan nilai (*exchange of equivalencies*). Itulah barter. Harga barang yang dipertukarkan sudah diketahui bersama sebelumnya. Ini terjadi karena ekonomi dijalankan dengan motif kesejahteraan bersama (komunitas); demi mencukupi kebutuhan diri (bukan mengejar keuntungan) dan tanpa merugikan satu sama lain (keadilan).

Itu sebabnya menjalankan kegiatan ekonomi atau memperoleh milik untuk mendukung kehidupan, bagi Aristoteles, merupakan sesuatu yang alamiah, wajar, dan karena itu rumah tangga harus selalu mengusahakan agar tetap tersedia barang di gudang yang memang dibutuhkan oleh seluruh komunitas. Kekayaan dalam arti sesungguhnya memang berupa barang dalam arti itu. Dan kekayaan demi pemenuhan kebutuhan sifatnya bukan tanpa batas. Sedangkan kekayaan yang diperoleh demi kekayaan melalui perdagangan (*commerce*) bukan sesuatu yang natural atau wajar. Mencari kebutuhan melalui perdagangan dianggapnya tidak wajar, tidak alamiah. Sifat non-alamiah diperlihatkan secara tegas ketika uang dijadikan alat ukur keuntungan. Dan karena tidak alamiah, maka kekayaan dalam bentuk ini ditolak. Sedangkan kekayaan yang alamiah sifatnya, pantas diterima (*necessary and recomendable*). Jadi, kekayaan alamiah (*household management*) dan kekayaan yang diperoleh melalui perdagangan (*commerce*) merupakan dua hal yang berbeda.<sup>13</sup>

Menarik bahwa dalam pembedaannya atas ekonomi rumah tangga (*oikos*) dan perdagangan komersial (*chremastitike*)<sup>14</sup>, Aristoteles sama sekali tidak merujuk masalah kelangkaan sumber daya (*resources scarcity*) yang oleh

sebagian ahli ekonomi modern, demikian Polanyi, dirujuk sebagai basis pembenaran pendekatan formalistik ekonomi.<sup>15</sup> Itu berarti, kehadiran ekonomi sebagai sistem tak harus dikaitkan dengan urgensi pemenuhan kebutuhan dalam situasi kelangkaan sumber daya. Ekonomi bagi Aristoteles hadir sebagai tindakan (*action*) di tengah tuntutan keniscayaan memelihara hidup. Itu sebabnya milik bagi Aristoteles hanya bermakna sejauh ditempatkan dalam bingkai “merawat hidup” dalam kebersamaan dengan sesama anggota komunitas.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah “mengapa motif kelangkaan dan keuntungan cenderung dijadikan motif utama ekonomi?” Atau, mengapa uang dan bukan kesejahteraan bersama yang menjadi tujuan ekonomi? Tentang persoalan ini Aristoteles menjawab: ... karena “manusia [hanya] terpreokupasi dengan hidup, *bukan hidup yang baik*” (penegasan dari penulis).<sup>16</sup> Sedangkan Polanyi akan menjawabnya dengan mengatakan bahwa hal itu terjadi karena di bawah mentalitas pasar manusia cenderung mereduksi makna hidup sebatas hidup ekonomis. Itu sebabnya ekonomi dilepaskan dari fungsinya yang lebih luas yakni relasi sosial. Kecenderungan ini bagi Aristoteles akan mendorong manusia untuk mengumbar nafsu pemenuhan kekayaan secara tanpa batas, bahkan dengan menggunakan cara-cara tidak wajar sekalipun.

Catatan di atas memperlihatkan bahwa bagi Aristoteles apa yang disebut kesejahteraan manusia tidak boleh direduksi menjadi semata-mata kekayaan ekonomis. Kemakmuran ekonomis (*economic prosperity*) harus dibedakan dari kesejahteraan sebagai kualitas hidup manusia (*human welfare*). Kemakmuran ekonomi dapat diperoleh dan dinikmati secara pribadi (individualis), tetapi tidak demikian halnya kesejahteraan. Yang terakhir ini tentu saja menuntut olah kemampuan untuk mencapai prestasi sebesar-

besarnya, juga dalam arti ekonomis, namun prestasi ekonomis tidak dengan sendirinya membawa kesejahteraan. Dalam bahasa Aristoteles, kesejahteraan (baca: kesempurnaan manusia) justru diperoleh melalui interaksi bebas dan dalam semangat kesetaraan di dalam *polis*.<sup>17</sup> Karl Polanyi mengikuti pola pikir Aristoteles ini. Baginya kesempurnaan hidup ditemukan dalam relasi sosial. Karenanya ekonomi hanyalah salah satu aspek yang maknanya harus ditempatkan di dalam relasi individu dengan manusia dan alam di sekitarnya. Nilai ekonomi dikejar tidak untuk memperkaya diri sendiri melainkan demi mengamankan posisi sosial, klaim-klaim sosial, serta kekayaan-kekayaan sosial. Bahkan apa yang disebut proses produksi dan distribusi, semuanya dilakukan dengan orientasi kebaikan komunitas.<sup>18</sup>

### 3. MENYIKAPI EFEK PASAR BEBAS

Joseph E. Stiglitz menyanjung karya Polanyi, *The Great Transformation* sebagai kritik yang tetap relevan dewasa ini. Sistem ekonomi pasar yang oleh sebagian orang dipandang menjadi terobosan cerdas untuk keluar dari kemiskinan, justru diragukan karena efek negatifnya, khususnya bagi masyarakat dunia ketiga. Mendukung kritik Polanyi atas sistem ekonomi pasar, Stiglitz berpendapat, sebagaimana telah dikutip sebelumnya, bahwa tak mustahil *self-regulating market* akan mendorong kapitalisme berkembang menjadi *mafia capitalism*, sebuah fenomena negatif sosio-ekonomis yang menurutnya semakin nyata dalam dunia dewasa ini.<sup>19</sup> Akan tetapi bagi Polanyi sinyal negatif ini tidak perlu ditanggapi dengan kerisauan yang berlebihan. Ia percaya bahwa masyarakat dalam dirinya punya kemampuan melepaskan diri dari belenggu negatif sistem ekonomi. Ia menyebutnya sebagai “*double movement*”; yakni, di satu sisi, adanya kekuatan pasar yang ditopang oleh asas “mengatur-diri-sendiri” (*self-regulating principle*), sementara,

di lain sisi, terdapat kemampuan masyarakat untuk melawan dan melepaskan diri dari kekuatan pasar dengan berbagai implikasi negatifnya.<sup>20</sup> Keyakinan Polanyi akan adanya dua arus yang saling berlawanan ini didukung oleh penelusuran baik historis maupun antropologis atas fenomena praktik ekonomi dalam masyarakat tribal.

Argumen historis dibangun berdasarkan penelitiannya atas sejarah ekonomi dan sosial Inggris sejak abad 18 sampai akhir abad 19. Apa yang disebutnya *double movement* justru lahir dan berkembang pertama kali di Inggris. Lahirnya *Speedhamland settlement* pada tahun 1795 yang menjamin harga kebutuhan dasar masyarakat Inggris, khususnya kaum miskin, di tengah gemuruh industrialisasi, menurut Polanyi, menjadi tanda bahwa masyarakat tidak tinggal diam berhadapan dengan dampak negatif industrialisasi serta kebebasan pasar yang mendukungnya. Undang-undang tersebut memperlihatkan bahwa kesadaran masyarakat akan hak atas hidup telah mendorong tumbuhnya rasa tanggung jawab dalam diri setiap anggota masyarakat terhadap nasib dan masa depan segenap anggota masyarakat itu sendiri. Kehadiran *Speedhamland settlement* menjadi tantangan langsung bagi ekonomi pasar.<sup>21</sup>

*Speedhamland settlement* memang akhirnya disingkirkan pada tahun 1834 setelah kelompok kapitalis (*burgher class*) memperoleh kekuasaan di Parlemen Inggris pada tahun 1832. Tersingkirnya peraturan perundangan yang membela kaum miskin ini menjadi awal lahirnya kapitalisme industrial. Kemenangan kapitalis di Parlemen membawa angin segar bagi pasar bebas dengan *self-regulating principle*-nya untuk menancapkan fondasi kehadirannya. Dominasi pasar bebas menjadi semakin kuat dengan lahirnya undang-undang Perbankan pada tahun 1844. Dogma *Laissez-faire* ekonomi pasar mempertegas dirinya melalui tiga doktrin pokoknya: pasar tenaga kerja yang

kompetitif, standard emas otomatis, dan perdagangan bebas internasional. Dengan doktrin seperti itu, menurut Polanyi liberalisme ekonomi seakan menjelma menjadi semacam agama yang membahayakan.<sup>22</sup> Akibat yang ditimbulkannya luar biasa. Efek negatifnya tidak saja semata-mata berupa kemiskinan yang semakin meliliti masyarakat, khususnya para buruh, melainkan, lebih dari pada itu, pasar bebas telah menimbulkan kerugian pada ranah kultural. Munculnya pasar bebas justru membawa serta sebuah relasi baru yang serba kompetitif yang berorientasi pada keuntungan sedemikian rupa sehingga menghancurkan ikatan-ikatan sosial berbasis nilai yang menjadi identitas masyarakat. Bahkan dalam jangka panjang, dengan tergerusnya nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harga diri manusia pun ikut dihancurkan.<sup>23</sup>

Catatan Polanyi ini pasti bukan tanpa alasan. Menyerahkan tenaga kerja pada persaingan pasar bebas, misalnya, mengingatkan kita akan kritik keras Karl Marx tentang betapa manusia teralienasi dari tenaga kerjanya sendiri akibat keserakahan ekonomi kapitalis. Barisan panjang tenaga kerja miskin yang mengantri mendapatkan kesempatan kerja telah memberi “*privilege*” kepada para kapitalis untuk memperlakukan manusia tak lebih dari alat untuk mengeruk kekayaan ekonomi. Di bawah tirani logika keuntungan, di satu pihak, dan kemiskinan, di lain pihak, buruh harus “rela” diperlakukan, meminjam istilah Marx, sebagai “komoditi”<sup>24</sup>. Di sinilah proses dehumanisasi terjadi, karena manusia diperalat demi kepentingan ekonomi. Juga tekanan pada kompetisi, cepat atau lambat akhirnya membuat mereka yang kurang atau tidak beruntung (*the least advantaged*), meminjam istilah John Rawls, tersingkir dari arena kompetisi. Kerja sama, resiprositas serta solidaritas sosial yang menjadi nilai-nilai tradisional

komunitas, di bawah tekanan logika keuntungan, terancam tergerus oleh arus kompetisi.

Tetapi sejarah Inggris mencatat bahwa negara dan masyarakat tidak tinggal diam berhadapan dengan dehumanisasi yang terjadi di bawah bendera *laissez-faire* ekonomi pasar. Terinspirasi oleh apa yang disebut *Bentham's Panopticon*<sup>25</sup>, pemerintah Inggris meningkatkan perannya untuk mengontrol pasar bebas. Melalui kontrol terpusat oleh negara, kebebasan natural Adam Smith dijinakkan dan dipaksa untuk lebih menyesuaikan diri dengan kebutuhan manusia. Dengan demikian, meskipun tetap mendorong beroperasinya ekonomi pasar, semangat individualisme berusaha ditekan dan membuka peluang bersinarnya kembali wajah kolektivisme. Gerakan ini berkembang, sebagaimana dicatat oleh Polanyi, terutama melalui Decay, seorang pejuang liberal, yang melakukan penelitian atas asal-usul *anti-laissez-faire* (baca: kolektivisme) pada akhir tahun 1860-an. Pantas dicatat bahwa apa yang disebut kolektivisme justru hadir karena kekuatan kebijakan politik negara.<sup>26</sup> Pada tahun 1860 lahir undang-undang yang mengontrol bahan bakar serta undang-undang yang mengatur sanksi bagi pertambangan yang memperkerjakan anak-anak; disusul undang-undang yang mewajibkan vaksinasi, undang-undang yang mengatur harga sewa sarana transportasi serta undang-undang berkaitan dengan masalah irigasi dan drainase di pedesaan pada tahun 1861. Semuanya menjadi contoh keberpihakan negara pada kepentingan publik (kolektivisme) dan sekaligus menekan semangat individualisme kapitalis. Bagi Polanyi semua ini menjadi petunjuk bahwa masyarakat, dengan bantuan pemerintah, selalu berusaha melindungi dirinya dari berbagai efek negatif pasar bebas.

Argumen historis di atas diperkuat oleh penelitian Polanyi terhadap pola relasi ekonomi dalam masyarakat suku. Penelitian antropologisnya

memperlihatkan bahwa apa yang disebut pasar bebas, yakni sistem pasar yang berorientasi pada keuntungan (baca: uang) tidak dikenal dalam masyarakat suku.<sup>27</sup> Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, penelitian antropologis atas fenomena ekonomi masyarakat tribal memperlihatkan bahwa ekonomi berkembang terutama karena motif-motif non-ekonomi. Ekonomi memainkan fungsi sebagai alat kohesi sosial karena melalui pertukaran (ekonomi) masyarakat tribal justru memelihara dan melanggengkan nilai-nilai sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Ekonomi berfungsi sebagai alat dan bukan tujuan. Di sini Polanyi menekankan pentingnya membedakan “pasar” dari “sistem pasar”. Pasar memang dikenal masyarakat tribal sebagai media tukar-menukar barang untuk memelihara hidup. Tetapi apa yang disebut sistem pasar sesungguhnya hal baru dalam budaya masyarakat. Pasar sebagai sistem memang sengaja diciptakan karena dorongan untuk mengejar keuntungan, sebuah tujuan yang menurut Polanyi hanyalah *utopia*, karena pasar akan gagal dihadang penolakan oleh masyarakat untuk melindungi diri sendiri dari erosi nilai yang diakibatkan oleh budaya ekonomi pasar (bebas).

*Double movement* Polanyi pasti bukan sebuah impian. Apa yang disinggung secara sepintas pada “pendahuluan” paper ini tentang tegangan politik menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden RI tahun 2009 ikut menjadi bukti betapa masyarakat tetap waspada terhadap jeratan ekonomi pasar bebas. Stiglitz bahkan secara eksplisit menyebut Indonesia sebagai salah satu korban doktrin ekonomi pasar melalui keterbukaannya menerima “kebijakan” IMF yang kemudian ternyata menjerat Indonesia dalam persoalan ekonomi yang semakin rumit dan runyam. Kesadaran akan dampak negatif pasar bebas dan perlunya tindakan untuk melepaskan diri dari padanya juga muncul dalam diri “raja” microsoft Bill Gates. Dalam

papernya “A New Approach to Capitalism” yang disampaikannya dalam “The World Economic Forum”, January 24, 2008, di Davos, Switzerland, sambil mengamini kegagalan kapitalisme memerangi kemiskinan, Gates menyerukan pentingnya negara-negara maju membuka dirinya untuk menciptakan pasar di negrinya sendiri bagi produk negara-negara sedang berkembang. Gates menyebut proposalnya *creative capitalism*.<sup>28</sup> Dengan kata lain, dunia harus berhenti terjebak dalam kompetisi yang tidak sehat dan mulai membangun kerja sama ekonomi secara konstruktif untuk memerangi kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, kompetisi ekonomi yang dilakukan dengan mengabaikan kooperasi akan terus menyeret manusia ke dalam kebrutalan kapitalisme vulgar.

#### 4. PENDERILAN EKONOMI

Pandangan Keynes, sebagaimana dikutip sebelumnya, tentang ekonomi sesungguhnya mengungkapkan secara berbeda pandangan Polanyi tentang ekonomi. Revolusi industri pada abad ke-18 memperlihatkan kemajuan luar biasa pada sisi alat produksi namun bersama dengan itu juga terjadi malapetaka bagi masyarakat umum. Revolusi industri telah mencampakkan manusia menjadi “gerombolan” tak beridentitas pribadi dan bahkan menghancurkan ikatan-ikatan sosial lama yang diperlihara dengan baik dan kemudian sia-sia berupaya menciptakan integrasi baru antara manusia dan alam. Itulah yang dicatat oleh Polanyi mengawali bab ketiga bukunya *The Great Transformation*. Mengapa demikian dan seberapa besar efek negatif dialami manusia akibat revolusi industri?

Kesejahteraan manusia yang menjadi tema penting dalam sejarah peradaban manusia tergerus dari sikap dan cara berpikir manusia akibat desakan ekonomi. Di bawah pengaruh utilitarisme kasar abad ke-19 yang

dikombinasikan dengan penerimaan tanpa sikap kritis terhadap ideologi pertumbuhan yang dipercayai sebagai keutamaan yang membawa perbaikan masyarakat, pandangan tradisional tentang ekonomi sebagai alat kesejahteraan bahkan lenyap dari kepala kaum terdidik. Kemalangan yang diderita manusia pada masa Revolusi Industri berangkat dari keyakinan bahwa dengan adanya industri manusia akan mampu memenuhi apa yang diinginkannya, yakni tempat tinggal. Kenyataan memperlihatkan yang sebaliknya: manusia gagal memenuhi keinginannya. Ini terjadi, demikian Polanyi, karena manusia gagal membaca secara kritis revolusi industri. Kegagalan itu terjadi justru karena kecenderungan untuk menilai peristiwa-peristiwa sosial semata-mata dari kaca mata ekonomi.<sup>29</sup> Lalu, apa yang salah dengan cara pandang ekonomi? Polanyi menyebutkan telah terjadi kesalahan dalam memahami ekonomi, yakni (1) kecenderungan mencampur-adukan ekonomi formal (*formal economy*) dengan ekonomi substantif (*substantive economy*); (2) kesesatan logis ekonomistik yang menyamakan begitu saja ekonomi dengan perwujudan kongkritnya, yakni pasar.<sup>30</sup>

Suatu kesalahan mendasar awal yang mengakibatkan ekonomi sebagai sistem semakin menjauh dari keberpihakannya pada kesejahteraan manusia adalah kegagalan membedakan secara tegas antara apa yang disebut ekonomi formal dan ekonomi substantif. Ekonomi formal bekerja dengan kerangka berpikir “alat-tujuan” (*means-end*). Dalam kerangka berpikir seperti itu, ekonomi formal hanya berurusan dengan pertanyaan bagaimana memaksimisasi nilai ekonomi berhadapan dengan masalah kelangkaan. Istilah populer “berpikir dan bertindak ekonomis” (*economizing*) menjadi contoh kongkrit cara berpikir formal. Tak jarang kita semua terjebak dalam anggapan populer bahwa berpikir ekonomis berarti menjadikan ilmu ekonomi sebagai alat untuk meningkatkan nilai ekonomis dari sumber daya

ekonomi yang tersedia. Dengan demikian ekonomi tidak lebih dari ilmu yang mengajarkan bagaimana melakukan pilihan-pilihan rasional atas alternatif sarana yang tersedia (*science of choice*) untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Dengan demikian ekonomi formal meletakkan keuntungan sebagai tujuan utama (*gain-oriented*).

Adanya ekonomi formal sebagai *mainstream* dan perilaku ekonomi merupakan konsekuensi dari pandangan umum yang menempatkan kelangkaan (*scarcity*) serta keniscayaan memilih (*the necessity of choice*) sebagai postulat tak terhindarkan dalam ekonomi. Logikanya, apabila sarana yang tersedia memang terbatas, maka manusia mau tidak mau dihadapkan pada keharusan untuk memilih secara tepat di antara sarana-sarana yang tersedia untuk memaksimalkan nilai ekonomi. Dalam bahasa Polanyi, “[ekonomi] formal mengandaikan sejumlah peraturan untuk memilih di antara alternatif pemanfaatan alat yang memang tidak mencukupi”, demi maksimisasi nilai sumber daya yang terbatas. Jadi ekonomi formal menunjuk pada relasi rasional antara sarana dan tujuan. Logika tindakan rasional menghasilkan ekonomi formal yang bermuara pada analisis ekonomi. Karena itu apa yang disebut analisis ekonomi tak lain dari penerapan ekonomi formal dalam bentuk ekonomi tertentu. Ekonomi pasar, misalnya, adalah contoh penerapan ekonomi formal yang didasarkan pada keyakinan bahwa melalui mekanisme pasar ekonomi dapat berkembang maksimal. Dengan kata lain, ekonomi pasar hanyalah sebuah pilihan di antara alternatif-alternatif ekonomi yang tersedia.<sup>31</sup>

Dalam semangat maksimisasi nilai ekonomi tidak terlalu sulit untuk dipahami bahwa kompetisi kemudian muncul sebagai etos yang dipercayai mampu mendongkrak prestasi ekonomi. Didorong oleh liberalisme dan individualisme sebagai iklim politik, pendekatan ekonomi formal justru akan

menempatkan keuntungan pribadi (*self-gain*), yang ditandai dengan akumulasi kekayaan pribadi, sebagai motif ekonomi. Pandangan ekonomi seperti itulah yang menurut Standfield mendominasi sikap dan cara berpikir umum (*mainstream*) abad ke-20, khususnya setelah Perang Dunia II. Bagi Standfield warisan ekonomi *mainstream* menjadi sesuatu yang tragis karena besarnya efek negatif yang ditimbulkannya sangat besar.<sup>32</sup> Cara pandang seperti itu akan semakin menjauhkan masyarakat dari semangat komunitarian, di mana setiap anggota melihat dirinya sebagai bagian dari komunitas “yang secara alami terbentuk untuk berkontribusi bagi pemenuhan kebutuhan bersama. ....itulah yang disebut rumah tangga, [karena] anggota-anggotanya hidup dalam semangat saling berbagai demi memenuhi kebutuhan hidup (*meal-sharers*).”<sup>33</sup>

Menyadari kelemahan ekonomi *mainstream*, Polanyi menekankan pentingnya memahami ekonomi secara substantif. Bagi Polanyi, untuk bertahan hidup sebagai manusia, ekonomi formal--yang menyibukkan diri dengan kalkulasi-kalkulasi ekonomi demi meningkatkan keuntungan diri sendiri—tidak mencukupi, bahkan tidak memadai; lebih penting dari pada itu adalah bahwa manusia harus mampu berinteraksi dengan manusia dan lingkungannya.<sup>34</sup> Keniscayaan untuk memperoleh kehidupan yang layak menuntut bahwa manusia harus menggantungkan hidupnya pada alam serta sesama manusia. Dengan demikian manusia harus mampu menempatkan dirinya dalam sebuah relasi integral dengan alam dan dunia di sekitarnya. Di sini ekonomi bagi Polanyi harus dipahami sebagai sebuah proses yang terlembagakan (*instituted process*). Interaksi antara manusia dan lingkungannya ini memungkinkan manusia untuk mendapatkan dan sekaligus menjamin keberlangsungan suplai sarana yang dibutuhkannya. Dalam arti ini, ekonomi substantif menuntut bahwa ekonomi tidak boleh berpusat atau berorientasi

secara egoistis pada diri sendiri. Ekonomi harus melayani kepentingan dan kesejahteraan bersama. Di sini Polanyi menempatkan ilmu ekonomi, meminjam istilah Keynes, terutama sebagai ilmu moral, bukan ilmu matematis.<sup>35</sup>

Dari uraian di atas jelaslah bahwa menurut Polanyi telah terjadi kesesatan konseptual atas ekonomi (*economistic fallacy*), yang menghinggapi sebagian ahli ekonomi. Inilah kesesatan berpikir yang menyamakan begitu saja ekonomi sebagai kegiatan manusia (yang sifatnya abstrak) dengan wujud kongkritnya, yakni pasar. Pemahaman komprehensif atas makna otentik ekonomi tak jarang terdistorsi oleh bias konseptual ini.<sup>36</sup> Pendekatan formalistik terhadap ekonomi yang sekaligus mengabaikan ekonomi substantif merupakan akibat langsung dari salah kaprah konseptual ini.

Pengabaian terhadap ekonomi substantif, di satu sisi, dan menyamakan begitu saja ekonomi dengan bentuk kongkritnya berupa pasar, di sisi lain, membuat ekonomi berjalan dengan pola pasar dan yang pada akhirnya mengakibatkan pasar begitu mendominasi relasi manusia. Implikasi lanjutannya, alih-alih sistem ekonomi tunduk dan tertanam dalam relasi manusia, yang terjadi adalah relasi manusia tunduk dan tertanam dalam sistem ekonomi. Kekayaan mosaik nilai-nilai kemanusiaan direduksi menjadi semata-mata ekonomis. Akibatnya, relasi sosial dikendalikan oleh pasar dan dengan itu ia membentuk masyarakat pasar (*market society*). Pada titik ini, ekonomi pasar menemukan habitusnya untuk tumbuh dan berkembang secara lebih leluasa.<sup>37</sup>

Pandangan Polanyi barangkali dianggap naif oleh sebagian ahli ekonomi terutama karena memberi kesan tidak realistis. Bagaimana memenuhi kebutuhan hidup yang semakin kompleks dewasa ini tanpa berseru kepada sebuah sistem ekonomi yang tidak hanya berbicara tentang

bagaimana menyediakan kebutuhan dasar manusia tetapi sekaligus juga membuka kesempatan yang lebih besar untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan yang semakin kompleks tersebut? Bukankah di sini diperlukan keuntungan sebagai insentif ekonomi untuk pada gilirannya menjadi kapital untuk membuka peluang ekonomi yang lebih besar?

Kalau argumen di atas diterima maka kita telah terjebak dalam absolutitas motif ekonomi. Dengan merelatifasi motif ekonomi, Polanyi ingin menegaskan bahwa ada saja nilai-nilai non ekonomis yang mampu berperan sentral dalam mendorong dan mengarahkan ekonomi. Nasionalisme atau solidaritas, misalnya, bisa saja menjadi insentif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Merkantilisme dalam sejarahnya berkembang tidak didorong semata-mata oleh kebutuhan ekonomi, melainkan juga oleh desakan dan merupakan ungkapan nasionalisme.<sup>38</sup> Di situ kekuatan ekonomi yang diperoleh melalui perdagangan internasional sebetulnya hanyalah tujuan instrumental atau tujuan antara. Yang lebih tinggi dari itu adalah motif untuk menegakkan kedaulatan dan kebanggaan negara atau bangsa. Ahli ekonomi Amerika Gregory Clark berpendapat serupa. Dalam artikelnya “The Lesson of History”, yang ditulisnya sebagai respon terhadap gagasan kapitalisme kreatif Bill Gates, Clark mengatakan: “...*non pecuniary motives can be very powerful and could be productively harnessed by modern profit-driven corporations*”. *The message of history is this: companies that can align their activities with solving humanity’s problems should find that they can hire people of greater talent, at lower price, than companies that seem to ponder only to people’s baser desires*”.<sup>39</sup>

Clark lalu menunjuk pada nilai-nilai seperti idealisme, kebanggaan, dan upaya mengejar kemasyhuran sebagai motif-motif (non ekonomi) yang punya pengaruh kuat di balik keinginan mengejar keuntungan (baca: uang).

Revolusi industri modern, menurut Clark, justru berkembang di atas motif-motif non-ekonomi. Clark yakin bahwa apa yang ia katakan bukan hal baru bagi dunia bisnis. Lalu, mengapa mereka tetap saja bekerja di bawah kolonisasi kapitalisme yang semata-mata mengejar keuntungan? Jawaban Clark adalah karena mereka kehilangan kesadaran sejati akan kebenaran fundamental, yakni motif-motif non ekonomi di balik keberhasilan ekonomi.

## 5. PENUTUP

Tesis pokok Polanyi adalah bahwa ekonomi secara mendasar mempunyai fungsi sosial lebih dari sekadar alat mengejar keuntungan. Dengan demikian, Polanyi meletakkan ekonomi dalam sistem nilai, budaya dan sejarah yang berkembang dalam suatu masyarakat. Membela ekonomi substantif dan sekaligus menekankan efek negatif perilaku ekonomistis yang merupakan anak kandung ekonomi formal, Polanyi mengingatkan kita untuk tidak mengebiri fungsi ekonomi menjadi semata-mata alat mengejar keuntungan. Ekonomi sebagai “tindakan” ikut berperan membangun budaya, sistem nilai, dan sejarah manusia. Dengan kata lain, ekonomi berfungsi terutama membangun lembaga-lembaga sosial dasar (*social basic institutions*) yang justru penting untuk menjaga keberlangsungan dan eksistensi sebuah komunitas atau masyarakat. Kata kuncinya adalah pertukaran (*exchange*), bukan keuntungan (*gain*); pemeliharaan hidup (*maintanance of life*) bukan relasi produksi (*relations of productions*).

Bersama ekonomi kekeluargaan Aristoteles, ekonomi substantif Polanyi menjadi catatan kritis terhadap ekonomi neoklasik atau yang populer disebut ekonomi pasar bebas. Melalui pendekatan historis-antropologis, Polanyi memperlihatkan bahwa *self-interest* dan *self-regulating*

*market* yang menjadi *credo* ekonomi pasar sesungguhnya tidak punya akar dalam budaya dan sistem nilai ontentik masyarakat. Karena itu selain merupakan kesesatan ketika ekonomi direduksi menjadi semata-mata ekonomi pasar, juga absolutisasi terhadap ekonomi pasar harus disingkirkan. Itu berarti, kebebasan, termasuk kebebasan ekonomi, harus ditempatkan dalam kerangka kemaslahatan masyarakat. Kebebasan (ekonomi) yang bermakna adalah kebebasan yang dijalankan di bawah payung asas resiprositas, karena kesejahteraan dalam arti luas (*human well-being*) mengandaikan penghayatan atas kebebasan yang bersifat resiprokal. Itu juga berarti ekonomi pasar bebas bukan sesuatu yang *given*.

Selain itu, pembelaan Polanyi pada ekonomi substantif tentu saja sebuah posisi yang patut didukung. Ekonomi sebagai sebuah kreasi kultural tidak boleh dibiarkan berkembang bebas tanpa menghiraukan nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan manusia. Singkatnya, ekonomi ada demi manusia dan bukan sebaliknya manusia ada demi ekonomi. Posisi ini hanya dapat dipertahankan apabila ekonomi dilihat hanya sebagai salah satu nilai di antara banyak nilai lainnya. Bahkan ekonomi juga tidak harus ditempatkan pada skala nilai teratas dengan mengsubordinasi nilai-nilai lain terhadapnya. Dalam arti ini, asas resiprositas, redistribusi dan kekeluargaan dapat berfungsi sebagai rem pengendali kecenderungan mengejar keuntungan atau akumulasi kekayaan tanpa batas.

Meskipun begitu, asas-asas yang pada galibnya positif ini tidak dapat lagi dipraktikkan dalam gaya dan bentuk tradisional. Kesadaran hak dan kewajiban dalam masyarakat modern menuntut penataan *basic social structure* secara baru sehingga, di satu sisi, kita tidak terkungkung dalam kolektivisme absurd dan, di sisi lain, kita terhindar dari individualisme naif. Kolektivisme

menjadi absurd ketika tekanan pada kepentingan umum membuat nilai-nilai sosial ekonomi didistribusikan secara sama tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan obyektif di antara sesama anggota masyarakat; sementara, masyarakat akan terjebak dalam individualisme naif ketika keunggulan individu menjadi satu-satunya basis normatif untuk mendistribusikan nilai-nilai ekonomi dengan akibat bahwa mereka yang paling tidak beruntung (*the least advantaged*) akan terus terpuruk dalam kemiskinan dan kemalangan sedangkan mereka yang lebih beruntung (*the better off*) akan terus menikmati hidup layak di tengah masyarakat yang serba miskin.

Di situ lalu menjadi penting untuk mengupayakan membangun masyarakat sebagai sebuah sistem kerja sama sosial yang *fair*.<sup>40</sup> Upaya ini perlu diusahakan secara sungguh-sungguh karena masyarakat modern, tepatnya, masyarakat politik, cenderung berwajah paradoks.<sup>41</sup> Di satu sisi, masyarakat politik--yang pada galibnya pluralistik--dipersatukan oleh ikatan politik; tetapi bersama dengan itu, di sisi yang lain, orientasi politik berpontensi menciptakan kerenggangan dalam masyarakat karena ikatan-ikatan tradisional tergerus oleh arus dan “paksaan” politik. Itu sebabnya Rawls menekankan pentingnya penataan *basic social structure*, yakni sistem hukum yang menjamin proses resiprokal dan distribusi nilai-nilai sosial berlangsung efektif.

Hal lain yang menarik untuk dicatat adalah bahwa baik Aristoteles maupun Polanyi sama-sama menekankan pentingnya dimensi etis ekonomi. Dengan menyoroti kelemahan ekonomi formal (Polanyi) serta menolak ekonomi perdagangan (Aristoteles), Aristoteles dan Polanyi menekankan pentingnya pendekatan etika dalam ekonomi. Mereka tidak sendirian. Ekonom kontemporer seperti Amartya Sen, penerima Nobel Ekonomi

1998, misalnya, juga menekankan makna yang sama. Menurutnya, terdapat relasi tak terpisahkan antara etika dan ekonomi. Bahkan dalam sejarahnya, demikian Sen, ekonomi dipandang sebagai cabang dari etika. Ekonomi, menurutnya, mempunyai dua sisi yang saling berkaitan, yakni sisi *normatif*—sisi etika, yang menegaskan tujuan dasar ekonomi, yakni demi kesejahteraan manusia; dan sisi *rekayasa*—ekonomi kalkulatif yang dewasa ini membuat ekonomi menjadi ilmu positif yang cenderung melepaskan diri dari sisi normatif. Sen tidak bermaksud menolak ekonomi rekayasa. Ia mengakui sumbangan positif ekonomi rekayasa. Akan tetapi, menurutnya, ekonomi akan menjadi lebih produktif apabila analisis-analisis ekonomi memasukkan pertimbangan-pertimbangan etika di samping pertimbangan non-etika.<sup>42</sup>

Terakhir, dengan menempatkan ekonomi dalam skala nilai yang lebih luas, Polanyi dan Aristoteles juga menegaskan bahwa kesejahteraan manusia harus dimengerti lebih dari sekadar kelimpahan ekonomis (*economic prosperity*). Ekonomi hanya salah satu nilai di antara nilai-nilai lainnya dan bahkan bukan merupakan nilai tertinggi dalam skala nilai manusia. Bagi Aristoteles, kesejahteraan ekonomis memang penting namun harus tetap ditempatkan dalam kerangka pertanyaan: bagaimana manusia hidup baik? Penyimpangan dari tujuan otentik ekonomi terjadi karena, demikian Aristoteles, manusia hanya berbicara tentang “hidup” dan mengabaikan bagaimana “hidup yang baik”. Di sini penting bahwa kegiatan ekonomi perlu diarahkan demi mencapai ideal hidup yang lebih tinggi—yakni, membangun kesejahteraan bersama—daripada sekedar kemakmuran ekonomis (individu). Keterarahan kepada sesama dan dunia di sekitarnya itu justru merefleksikan posisi ontologis manusia sebagai *social being*.

Relevan dengan catatan terakhir di atas adalah bahwa pendekatan kuantitatif dalam ekonomi perlu dicermati secara kritis. Kecenderungan

ekonomi modern menggunakan indikator-indikator kuantitatif sebagai tolok ukur kemajuan ekonomi perlu diwaspadai karena kemajuan kuantitatif tidak dengan sendirinya “setali tiga uang” dengan peningkatan kualitas kesejahteraan manusia. Angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dengan sendirinya menjadi indikator valid telah terwujudnya kesejahteraan sosial segenap anggota masyarakat.\*\*\*)

### CATATAN AKHIR

---

<sup>1</sup> Demikian John Maynard Keynes sebagaimana dikutip oleh Michel Bound and Gilles Dostaler dalam karya mereka, *Economic Thought Since Keynes, A History and dictionary of Major Economists* (London: Routledge, 1997), hal. 25.

<sup>2</sup> Lihat Joseph E. Stiglitz, “Foreword”, dalam Karl Polanyi, *The Great Transformation. The Political and Economic Origins of Our Time* (Boston: Beacon Press, 2001), hal. Vii – xvii.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 48 dst.

<sup>4</sup> Nilai-nilai seperti itu, menurut Polanyi, dapat ditemukan dalam berbagai suku bangsa berbeda, seperti masyarakat Persia, India, China dan masyarakat kerajaan Mesir baru. Dan pasti tidak terlalu sulit menemukan bahwa nilai-nilai yang sama juga sampai sekarang masih terus dipraktikkan dan terpelihara dengan baik oleh berbagai suku di Indonesia (Karl Polanyi, 2001, *op.cit.*)

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 49-58.

<sup>6</sup> Meskipun memiliki motif berbeda, pemikiran ekonomi Polanyi dan Adam Smith sama-sama bersifat komunitarian. Membaca karya Smith *The Wealth of Nations*, khususnya chapter III, kesan yang muncul adalah kuatnya orientasi kepentingan diri dalam kegiatan ekonomi. Smith percaya bahwa dengan *ethos* resiprositas berbasis cinta dan persahabatan masyarakat akan berkembang dengan baik. Namun Smith juga yakin bahwa tanpa motif-motif moral seperti itu sekalipun masyarakat akan tetap bertahan karena adanya pertukaran sebagai upaya mencari keuntungan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan tertentu. Bahkan demi kepentingan dirinya (dalam arti ekonomi), individu mau tidak mau harus menjadikan *self-love* pihak lain sebagai “bagian dari kepentingannya sendiri”. Dengan cara itu, orang lain pun mau tidak mau memberi perhatian pada kepentingan individu yang bersangkutan. Lebih dari itu, demi mencegah nafsu menumpuk kekayaan berlebihan (yang akhirnya merugikan pihak lain), Smith tak ragu-ragu berseru kepada negara. Dalam arti ini, orientasi ekonomi Smith tidak dapat disebut egoistis. Bahkan kalau *The Wealth of Nations* dibaca bersama dengan karyanya yang lain, *The Moral Sentiments*, tampak jelas watak komunitarian ekonomi Smith. Karena itu, terlepas dari berbagai keberatan moral terhadap gagasannya tentang ekonomi pasar bebas, bersama Karl Polanyi, Smith boleh disebut sebagai pembela ekonomi komunitarian (Bdk. “Adam Smith, On Justice as a Moral Sentiment and on Virtues of the Free Market”, yang diambil dari *A Theory of the Moral Sentiments and The Wealth*

*of Nations*, dalam Robert C. Solomon & Mark C. Murphy (eds.), *What is Justice?* (New York & Oxford: Oxford University Press, 1990), hal. 163 dst.)

<sup>7</sup> Lihat Polanyi (2001), *op.cit.* hal. 56. Polanyi mengakui bahwa distingsi yang dilakukan Aristoteles memang benar. Meskipun dengan itu Aristoteles, demikian Polanyi sebetulnya tidak cermat melihat apa yang sesungguhnya terjadi dalam dunia ekonomi Yunani pada masa itu. Menurut Polanyi, justru pada masa Aristoteles, bangsa Yunani sudah mengenal perdagangan besar-besaran dan peminjaman modal. Apa yang sekarang dikenal sebagai asuransi muatan kapal atau Giro Bank, menurutnya, bukan hal baru. Semuanya sudah dikenal dan dipraktikkan dalam sistem perekonomian bangsa Yunani pada masa Aristoteles.

<sup>8</sup> Lihat Aristotle, *Politics* (United States: Hackett Publishing Company, Inc, 1998), Chapter 4, hal. 6 – 7; Chapter 8, hal. 13. Perlu dicatat bahwa ketika mengatakan bahwa ekonomi adalah aksi dan bukan produksi, Aristoteles sama sekali tidak memaksudkan bahwa produksi sebagai salah satu unsur pokok tidak penting. Produksi tetap perlu. Namun yang hendak ditekankan oleh Aristoteles adalah bahwa produksi hanya dibenarkan, dalam arti dapat diterima, sejauh dilakukan dan hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan individu dan komunitas. Yang ditolaknya adalah produksi yang dilakukan dengan motif mencari keuntungan (*usury*) pribadi. Itu sebabnya ia menolak perdagangan dalam arti pasar yang diciptakan untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk uang.

<sup>9</sup> Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, Second Edition, translated with introduction, notes, and glossary by Terrence Irwin (Indianapolis & Cambridge: Hackett Publishing Company, Inc., 1999), hal. 49 dst.; 67 dst.

<sup>10</sup> Lihat Aristoteles (1998), *op.cit.*, Book One, Chapter 9, hlm. 16.

<sup>11</sup> Lihat Polanyi, “Aristotle Discovers The Economy”, dalam Karl Polanyi *et al.* (eds.), *Trade and Market in the Early Empires, Economies in History and Theory* (New York: The Free Press, 1957), hal. 93. Praktik resiprositas ini sebagaimana dijelaskan Polanyi, dilakukan secara tradisional oleh masyarakat Yunani khususnya dalam perayaan-perayaan umum, ntah yang bersifat religius atau seremoni publik lainnya. Karena itu, demikian Polanyi, ketika istilah *metadosis* ditafsirkan sebagai pertukaran, maka watak *truis* (orientasi sadar pada kepentingan orang lain) gagasan ekonomi Aristoteles justru hilang.

<sup>12</sup> Lihat John Rawls, *A Theory of Justice*, revised edition (Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 1999).

<sup>13</sup> Lihat Aristotle (1998), *op.cit.*, Chapter 8;9; 10.

<sup>14</sup> Dalam berbagai tulisan yang menjelaskan gagasan ekonomi Aristoteles, “perdagangan komersial” digunakan sebagai terjemahan dari kata “*chrematistike*” dalam bahasa Yunani. Istilah “*chrematistike*” menurut Polanyi memang sering digunakan dalam arti “mencari keuntungan” (*money-making*). Namun ketika digunakan Aristoteles untuk menjelaskan konsep ekonominya, pemikir Yunani ini sesungguhnya menggunakannya, menurut Polanyi, dalam arti menyediakan kebutuhan dasar hidup manusia (*supply of the necessities of life*). Mengutip Ernest Baker, Polanyi mengatakan bahwa makna asli *chremata* bukan uang, melainkan kebutuhan dasar itu sendiri. Sedangkan perdagangan komersial yang ditolak oleh Aristoteles karena dipandang penuh dengan penipuan (*fraud*) dan kecurangan (*cheating*) lebih tepat disepadankan dengan *kapelike* dalam bahasa Yunani

sebagaimana diperkenalkan oleh Herodotus. *Kapeliike* adalah perdagangan komersial yang memang dimaksudkan untuk mengejar keuntungan (uang). Menurut Polanyi, perdagangan yang ditolak Aritoteles karena membenarkan praktik riba (*usury*) lebih tepat disebut dengan istilah *kapelika*. Istilah Yunani yang menunjuk pada perdagangan dalam arti retail untuk memperoleh keuntungan ( Bdk. Karl Polanyi, “Aristotle Discovers The Economy”, dalam Karl Polanyi (1957), *etal*, ( ed). *op.cit.*, hal. 92-93).

<sup>15</sup> Lihat Polanyi, “The Economy as Inbstituted Process”, dalam Karl Polanyi (1957), et al. (eds.), *ibid.*, hal. 243-270.

<sup>16</sup> Lihat Aristotle ( 1998), *op.cit.*, hal. 15.

<sup>17</sup> *Ibid*, Book One, Chapter 2. Aristoteles menyebut manusia sebagai *political animal* untuk menegaskan eksistensi alami manusia dan sekaligus menunjukkan *habitus* di mana manusia harus tinggal, hidup dan berkembang seutuhnya sebagai manusia.

<sup>18</sup> Lihat Karl Polanyi ( 2001), *op.cit.*, hal. 48.

<sup>19</sup> Lihat Josep E. Stiglitz, “Foreword”, dalam Polanyi (2001), *ibid.*, hal. Vii-xvii.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 33; 243,

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 78.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 144-145. Dengan merujuk kebijakan Parlemen sebagai basis dan iklim berkembangnya asas *laissez-faire*, Polanyi juga hendak menegaskan bahwa *laissez-Faire* yang menjadi dogma keonomi pasar bukanlah sesuatu yang natural. *Laissez-ifare* diciptakan oleh manusia dan karenanya seharusnya dapat diubah atau disingkirkan ketika tidak lagi memadai, apalagi dipandang mengancam nilai-nilai kemanusiaan.

<sup>23</sup> Lihat Gregory Baum, *Karl Polanyi On Ethics and Economics* (Montreal & Kingstone, London, Bufallo: McGill-Quins University Press, 1923), hlm. 8-9.

<sup>24</sup> Kompetisi tenaga kerja melalui pasar bebas tenaga kerja telah membuat buruh tidak punya alternatif pilihan untuk bertahan hidup selain dengan menerima upah rendah yang ditawarkan kapitalis. Akan tetapi kritik seperti ini tidak muncul pada Polanyi, melainkan pada Karl Marx. Fokus Polanyi ada pada pertukaran (saling memberi) sebagai sarana membangun relasi sosial; sedangkan Marx memusatkan perhatiannya pada hubungan produksi dalam sistem kapitalisme.

<sup>25</sup> “*Panopticon*” adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sistem kontrol yang dilakukan bagi para tahanan di sebuah penjara. Di situ penjara dibangun dalam bentuk ”bintang” dan di tengah-tengahnya berdiri sebuah menara kontrol yang pengawasnya sendiri tidak terlihat oleh para tahanan. Meskipun tidak terlihat, tahanan akan selalu berusaha untuk tidak berulah, karena merasa selalu berada di bawah kontrol. Inilah cara yang mudah dan murah namun efektif, karena secara psikologis menciptakan rasa terus dikontrol dalam diri para tahanan. Bentham membayangkan bahwa demi kebaikan bersama (*greatest benefit for the greatest numbers*), negara dapat memainkan peran seperti itu. Prinsip utilitarian hanya dapat berfungsi efektif apabila negara memainkan fungsi kendali yang efektif pula melalui kebijakan-kebijakan politiknya (Bdk. Karl Polanyi [2001], *op.cit.*, hal. 146).

<sup>26</sup> Lihat Gregory Baum, *op.cit.*, hal. 9-10.

<sup>27</sup> Lihat Polanyi (2001), *op.cit.*, hal. 45 dst.

<sup>28</sup> Lihat Bill Gates, “A New Approach To Capitalism”, dalam Michael Kinsley, (ed.), *Creative Capitalism, A Conversation with Bill Gates, Warren Buffet and Other Economic Leaders* (New York, London, Toronto, Sydney: Simon & Schusters, 2008), hal. 7-16.

<sup>29</sup> Lihat Karl Polanyi (2001), *op.cit.*, hal. 35-36.

<sup>30</sup> Polanyi menguraikan masalah ekonomi formal dan substantif dalam bukunya *The Livelihood of Man* (New York: Academic Press, 1977). Tetapi secara khusus topik tersebut dapat dibaca dalam esainya “The Economy as Instituted Process”, dalam Karl Polanyi (1957) et al. (eds.), *op.cit.*, hal. 243-270. Sebuah analisis menarik atas pemikiran Polanyi untuk topik ini dapat dibaca di dalam J.R. Stanfield, *The Economic Thought of Karl Polanyi* (New York: Mac Millan Press Ltd.), 1986, hal. 33-53.

<sup>31</sup> Lihat Karl Polanyi (1957), et.al (ed), *op.cit.*, hal. 243 – 247.

<sup>32</sup> Lihat J.r. Stanfield (1986), *op.cit.*, hal. 33-34.

<sup>33</sup> Lihat Aristotle (1998), *op.cit.*, hal. 3.

<sup>34</sup> Lihat Karl Polanyi (1957), et.al (ed), *op.cit.*, hal. 348.

<sup>35</sup> Lihat juga Amartya Sen, *On Ethics and Economics*, diindonesiakan oleh Rahmini Astuti, *Masih Adakah Harapan Bagi Kaum Miskin?* (Bandung: Mizan Media Utama,) 2001.

<sup>36</sup> Lihat Polanyi, *Livelihood of Man*, hlm. 20.

<sup>37</sup> Lihat Karl Polanyi (2001), *op.cit.*, hal. 60 dst.

<sup>38</sup> Merkantilisme yang berkembang pada abad ke-16 memang bisa dimaknai secara beragam. Melalui perdagangan yang bertumpuh pada emas dan perak, negara-negara seperti Inggris, Prancis, dan Spanyol tidak bermaksud sekedar mengumpulkan kekayaan ekonomi melainkan memperlihatkan kekuatannya terhadap pesaing-pesaingnya. Sistem ekonomi dengan demikian selalu dikaitkan dengan nasionalisme karena keunggulan pasar dilihat sebagai simbol kedaulatan (Lihat <http://mars.wnc.edu/grample/courses/wcd2/lectures/mercantilism.htm>; <http://www.answers.com/topic/mercantilism>. diunduh 13/01/2010)..

<sup>39</sup> Lihat Gregory Clark, “The Lesson of History”, dalam Michael Kinsley, (ed.), *op.cit.*, hal. 183-185

<sup>40</sup> Lihat John Rawls, *Political Liberalism* (New York: Columbia University Press), 1996, hal. 15-21.

<sup>41</sup> Uraian menarik tentang gejala politik ini dapat dibaca di dalam Jacques Derrida, *Politics of Friendship*, translated by George Collins (London, New York: Verso), 1997.

<sup>42</sup> Lihat Amartya Sen, *op.cit.*, hal.1-9. Lihat juga Stephen Young, *Moral Capitalism. Reconciling Private Interest with the Public Good* (San Francisco: Berrett-Koehler Publisher, Inc.), 2003.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aristotle, (1998) *Politics*, Translated by C.D.C. Reeve, United States: Hacket Publishing Company, Inc.
- , (1999) *Nicomachean Ethics*, Second Edition, Translated with introduction, notes and glosary by Terence Irwin, Indianapolis & Cambridge: Hacket Publishing Company, Inc.
- Baum, Gregory, (1923), *Karl Polanyi on Ethics and Economics*, Montreal & Kingston, Mc-Gill-Queen's University Press.
- Beaud, Michel & Dostaler, Gilles, (1995), *Economic Thought Since Keynes*, London and New York: Routledge.
- Derrida, Jacques, ( 1997,) *Politics of Friendship*, Translated by George Collins, London, New York: Revo.
- Gates, Bill, "A New Approach to Capitalism", dalam Michael Kinsley, ed.,( 2008) *Creative Capitalism*, New York: Simon & Schuter.
- Polanyi, Karl, (2001), *The Great Transformation. The Political and Economic Origins of Our Time*, Foreword by Joseph E. Stiglitz, Inroduction by Fred Block, Boston: Beacon Press.
- , "Aristotle Dsicovers The Economy", dalam Karl Polanyi et al., (eds.), (1957), *Trade and Market in the Early Empires, Economies in History and Theory*, New York: the Free.
- Rawls, John, ( 1996), *Political Liberalism*, New York: Columbia University Press.
- Sen, Amartya, (2001), *Masih adakab Harapan Bagi Kaum Miskin?* Terjemahan oleh Rahmani Astuti, Bandung: Mizan Media Utama.
- Stanfield, J.R., (1986), *The Economic Thought of Karl Polanyi*, Hongkong: MacMillan Press Ltd.